

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Asnawi, M. N (2020). Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum). Jakarta: Kencana.
- Arto, M (2019). Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Efendi, J.. & Rijadi, P. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2021). Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Malang: CV Lestari Nusantara.
- Istiqamah, (2014). Hukum Perdata (Hukum Orang dan Keluarga). Makassar: Alauddin University Press.
- Kusumastuti, A.. & Khoiron, M. A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif: Semarang. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Hardani, dkk (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Cv. Pustaka Ilmu.
- Nurdin, I.. & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Ilmu Sosial. Media Sahabat Cendekia.
- Raco, J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Pt Grasindo.
- Safira, M. E. (2017). Hukum Perdata. Ponorogo: Cv.Nata Karya.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Ponorogo: Cv. Nata Karya.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D . Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, A. (2012). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Sumber Jurnal

- Abjul, A. R. (2017) Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Administratum*.
- Andriani, D. Pemisahan Harta Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya Jika Diwariskan Tanpa Wasiat Pada Anak Berkewarganegaraan Ganda.
- Arief, H (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). *Al'Adl*.
- Edlynafitri, R. S. (2015). Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga. *Lex Privatum*.
- Hardjanti, A. D. (2018). Tinjauan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Penyitaan Harta Penanggung Pajak Orang Pribadi Oleh Direktorat Jenderal Pajak. Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Kualaria, S. (2015) Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan. Naskah Publikasi Jurnal.
- Mahmudah & Sururie (2023). Bentuk dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*.
- Mayasari, L. D. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Journal of Economics, Law, and Humanities*.
- Mulyati, D. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing. *Jurnal IUS*.
- Sacharissa, Y. D. (2016). Pemisahan Harta Perkawinan Melalui Permohonan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Yang Dilakukan Setelah Perkawinan (Studi Kasus). *Jurnal Repertorium*.
- Sukardi. (2016). Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*.

Sumber Skripsi

- Damayanti, Hefina. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Fadhilla, Gadis Ayu. (2020). Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Iskandar, Yusuf. (2019). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. Fakultas Hukum. Universitas Pancasakti Tegal.
- Maulida, Muhammad Jaedi. (2019). Tinjauan Hukum Harta Bawaan Yang Berubah Menjadi Harta Bersama Menurut Hukum Positif. Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Universitas Borneo Tarakan. Fakultas Hukum.
- Pratama, Yudha. (2021). Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN/Jkt.Tim

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015